



Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Nopember tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedang Penggugat diajak Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak mau meninggalkan orangtua Penggugat hidup sendiri karena Penggugat anak tunggal dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2013 sampai sekarang.

Tergugat telah meninggalkan Penggugat bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir secara hukum di persidangan dipandang telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap. Walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan bukti P-2 yang menurut majelis telah memenuhi persyaratan meteril dan formil. Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Rumbah binti Nurkawi dan Misriyah binti Tarib dan dari keterangan para saksi tersebut bersesuaian

satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2(dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 dan belum mempunyai anak; -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember tahun 2013 sudah tidak harmonis karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak betah dan tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan mengajak Penggugat pindah ke rumah orangtua Tergugat namun Penggugat tidak mau karena Penggugat anak satu-satunya dan tidak ada yang menemani orangtua Penggugat.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih dari tahun; -Bahwa Penggugat dan tergugat sudah dinasehati untuk rukun namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah setidaknya telah retak karena percekocokan yang terjadi secara terus menerus, keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi sebagai suami isteri disamping itu,

keduanya telah pisah rumah selama 1 tahun lebih sampai sekarang dan selama itu Penggugat/Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga.

Sehingga tujuan perkawinan yang suci sebagaimana diamanahkan dalam Al Quran surat al-Rum Ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat kedua belah pihak adalah perceraian.

Menurut pendapat dari seorang Bapak ketua Majelis persidangan dalam perkara Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.BKL, yaitu Bapak Drs. Imam Marnoto, SH. MH mengatakan bahwa:

“yang saya pahami tentang permasalahan antar penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah penentuan tempat tinggal dimana penentuan tempat tinggal merupakan sebuah permasalahan yang sangat sepele, sedangkan menurut orang Madura perceraian yang terjadi karena penentuan tempat tinggal merupakan kejadian biasa. Dimana jika istri tidak mengikuti



suatu pernikahan perceraian sudah hal yang lumrah dalam menjalani hubungan ada kecocokan dan ketidakcocokan”.

Berdasarkan alasan tersebut maka permohonan tergugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Permasalahan Cerai Gugat Karena Perselisihan Penentuan Tempat Tinggal oleh hakim di pertimbangkan dan di putuskan permohona tergugat dikabulkan. Berdasarkan bukti-bukti dan tidak hadirnya tergugat. Menurut pengamatan penulis pertimbangan hakim sudah sesuai diman hakim mempertimbangkan permasalahan ini berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan peraturan undang-undang dan hokum Islam.

Meskipun permasalahan tempat tinggal bukan merupakan alasan yang menguatkan menurut hukum Islam dan hokum positif tetapi pertengkaran dan tergugat sudah meninggalkan penggugat sudah hampir 2 tahun itu sudah merupakan alasan yang kuat sehingga hakim dapat mempertimbangkan perceraian antara pengguagt dan tergugat. Jika memang dapat dipertahankan pernikahan tersebut oleh seorang suami atau tergugat maka tergugat pasti akan hadir dalam persidangan tersebut.

Bapak H. Abdul Majid, SHI. MH. Selaku ketua Pengadilan Agama mengatakan bahwa:

“Prinsip orang Madura adalah harta, tahta, dan harga diri. Dimana symbol dari pernikahan orang Madura di kalangan masyarakat Kabupaten Bangkalan. “Tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan



















